



RENCANA KERJA – PERUBAHAN TAHUN 2017

RSUD dr. SOEDONO MADIUN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.SOEDONO MADIUN

Jl. Dr. Soetomo no. 59 Madiun
Telp. (0351) 464325-464326 Fax. (0351) 458054

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) – Perubahan RSUD dr. Soedono Madiun Tahun 2017 dibuat untuk bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) – Perubahan Tahun 2017. Dalam buku Renja - Perubahan RSUD dr. Soedono Madiun Tahun 2017 yang disusun berisi : pendahuluan, evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, serta penutup.

Pada Renja Tahun 2017 untuk belanja langsung membutuhkan anggaran sebesar Rp. 278.148.241.000,00 terdiri dari Anggaran Subsidi sebesar Rp. 83.144.399.000,00 dan Anggaran Fungsional sebesar Rp. 195.003.842.000,00

Prioritas pembangunan tahun 2017 adalah pengembangan trauma dan critical center 10 lantai serta pembangunan rawat jalan kelas utama 4 lantai. Adapun anggaran DAK untuk pengadaan peralatan kedokteran.

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra RSUD dr. Soedono Madiun tahun 2014 – 2019. Program dalam Rencana Kerja Tahun 2017 ada 6 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, Program Penyusunan Pengendalian & Evaluasi Dokumen, Program Peningkatan Sarana & Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Dengan program yang hanya berjumlah 6 tersebut akan memberikan kemudahan dalam meletakkan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan secara profesional dan sesuai standart pelayanan yang ditetapkan.

Pada Renja Perubahan tahun 2017, untuk belanja langsung membutuhkan anggaran sebesar Rp. 321.821.686.618,00 terdiri dari anggaran subsidi sebesar Rp. 106.330.770.496,00 dan anggaran fungsional Rp. 215.490.916.122,00

DAFTAR ISI

BAB I	: Pendahuluan.....	4
	I.1. Latar Belakang	4
	I.2. Landasan Hukum	5
	I.3. Maksud dan Tujuan.....	6
BAB II	: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu.....	8
	II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	8
	II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	28
	II.3. Isue-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	30
	II.4. Review terhadap Rancangan Aawal RKPD	32
	II.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat	40
BAB III	: Tujuan, Sasaran Program& Kegiatan.....	44
	III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	44
	III.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	44
	III.3. Program dan kegiatan.....	45
BAB IV	: Penutup.....	51

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Permendagri No. 54 Tahun 2010 mewajibkan setiap perangkat SKPD untuk menyusun rencana strategis (Renstra) sebagai proyeksi program / kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang. Dari dokumen Renstra selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja (Renja)

Rencana Kerja (Renja) RSUD Dr. Soedono Madiun tahun 2017 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan rujukan di rumah sakit agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Dr. Soedono Madiun Tahun 2017 terutama berpedoman pada Rencana Strategis RSUD Dr. Soedono Madiun Tahun 2014 – 2019 dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta disinergikan dengan program Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 - 2025 , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014 – 2019 serta RKPD provinsi Jawa Timur.

Rencana Kerja RSUD Dr. Soedono Madiun tahun 2017 ini selaras dengan prioritas pembangunan serta arah kebijakan umum tahun 2014-2019 pada point 2 yang menyebutkan “Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan.

Selanjutnya Rencana Kerja RSUD Dr. Soedono Madiun tahun 2017 merupakan tahun ketiga dalam matriks Renstra 2014 – 2019 dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA 2017. Pada Renja Tahun 2017 terdiri dari 6 program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
6. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan RSUD dr. Soedono Madiun tahun 2017 dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2017 untuk bahan penyusunan APBD Perubahan tahun 2017, selain itu merupakan bagian dari proses penilaian kinerja instansi pemerintah yang nantinya dievaluasi dan disusun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip).

I.2. Landasan Hukum

Dasar hukum untuk penyusunan Rencana Kerja RSUD Dr. Soedono Madiun tahun 2017 mengacu pada :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4285);
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
3. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 nomor 21);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008
17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud:

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD (Renja Perubahan SKPD) RSUD Dr. Soedono Madiun Tahun 2017 ini dimaksudkan agar :

- a. Program dan kegiatan Tahun 2017 sesuai dengan Rencana Strategis RSUD Dr. Soedono Madiun Tahun 2014 – 2019, Program dan Kegiatan (RKPD) Provinsi Jawa Timur, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019
- b. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi

I.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan RSUD Dr. Soedono Madiun tahun 2017 bertujuan untuk :

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Renstra RSUD dr. Soedono Madiun dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang pelayanan kesehatan khususnya di RSUD Dr. Soedono Madiun selama 1 (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.
- b. Evaluasi terhadap program dan kegiatan tahun sebelumnya, dan sebagai bahan untuk penyusunan program dan kegiatan tahun berikutnya.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan perkiraan capaian pelaksanaan Renja Tahun 2016 yang mengacu pada APBD yang berjalan tertera berikut ini.

1. Program Pelaksanaan Administrasi Perkantoran terdiri dari 1 kegiatan yaitu ;

1.1.Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.2.288.902.850 realisasi sebesar Rp.1.777.919.750 atau 77,68%. Dengan target kinerja presentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran, prosentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 80% dan terealisasi sebesar 79% atau capaian 98% .

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

2.1 Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp.5.853.744.192 realisasi sebesar Rp.4.497.493.816 (76,83%). Dengan target kinerja jumlah peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang tersedia sejumlah 8 paket belanja bahan pakai habis, belanja bahan/material, belanja jasa, belanja sewa alat berat/peralatan, belanja modal pengadaan peralatan dan/perlengkapan kantor , belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi dan realisasi sebesar 8 paket atau capaian 100%

2.2.Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp.2.774.990.884 realisasi sebesar Rp.2.275.727.140 (82,01%). Dengan target sejumlah 8 paket belanja bahan/material bahan kimia, belanja jasa, belanja premi, iuran, asuransi dan pemeriksaan kesehatan, belanja perawatan kendaraan bermotor dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta belanja pemeliharaan di Instalasi Pengolahan Limbah dan instalasi pengolahan data elektronik realisasi sebesar 8 paket atau capaian 100%.

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

3.1 Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp.1.180.499.984 realisasi sebesar 1.069.907.877 (90,63%). Dengan target kinerja prosentase kesesuaian kelembagaan sarana dan prasarana yang tersedeia sejumlah 8

paket belanja bahan pakai habis cinderamata/souvenir, belanja jasa dokumentasi dan publikasi, belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan, belanja perjalanan dinas realisasi sebesar 8 paket atau capaian 100%.

3.2 Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebesar Rp.1.007.685.000 dengan realisasi sebesar Rp.808.645.566 (80,25%). Dengan target kinerja jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal sejumlah 50 orang dengan realisasi sejumlah 169 orang atau capaian 338%

4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri dari 3 kegiatan yaitu :

4.1 Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp.57.945.000 dan realisasi sebesar Rp.43.328.750 (74,78%). Dengan target kinerja dokumen pelaporan tersusun sejumlah 8 buku dokumen dan realisasi sejumlah 11 buku dokumen atau capaian 138%.

4.2 Kegiatan : Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp.65.740.000 dan realisasi sebesar Rp.45.914.800 (69,84%). Dengan target kinerja dokumen pelaporan yang tersusun sejumlah 31 buku dokumen laporan dan realisasi sejumlah 56 buku dokumen laporan atau capaian 180,65%.

4.3 Kegiatan : Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp.36.480.000 dan realisasi sebesar Rp.36.120.000 (99,01%). Dengan target kinerja jumlah update data SKPD yang dilaksanakan selama 12 bulan realisasi sebesar 12 bulan atau capaian 100%.

5. Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terdiri dari 6 kegiatan yaitu :

5.1 Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK) dengan anggaran sebesar Rp.1.200.000.000 dan realisasi sebesar Rp.1.104.186.250 (92,02%). Dengan target kinerja jumlah paket pengadaan alat kedokteran sejumlah 3 paket berupa ventilator transport dan incubator bayi (elektrik) untuk peningkatan pelayanan kesehatan realisasi sebesar 3 paket atau capaian 100%.

5.2 Kegiatan : Pendampingan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) dengan anggaran sebesar Rp.120.000.000 dan realisasi sebesar Rp.108.936.672 (90,78%). Dengan target kinerja jumlah paket pengadaan alat kedokteran sejumlah 1 paket berupa Obstetri Gynecology Instrumen Set untuk pendampingan pelayanan kesehatan rujukan dan realisasi sebesar 1 paket alat kedokteran atau capaian 100%.

- 5.3 Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll) RS/RSK/Balai/Akper/ Latkesmas dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000 dan realisasi sebesar Rp.97.955.000 (97,96%). Dengan target kinerja jumlah paket pengadaan perlengkapan rumah tangga sejumlah 3 paket berupa AC 2 PK, Lemari Arsip dan Hard Disk 1 tera Bite realisasi sebesar 3 paket peralatan dan perlengkapan kantor atau capaian 100%.
- 5.4 Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas dengan anggaran sebesar Rp.3.030.000.000 dan realisasi sebesar Rp.2.900.793.500 (95,74%). Dengan target kinerja jumlah paket pengadaan alat kedokteran sejumlah 1 unit berupa Centrifuse Minispine untuk peningkatan pelayanan Laboratorium realisasi sebesar 1 unit alat Laboratorium atau capaian 100%.
- 5.5 Kegiatan : Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak asap Rokok (DBHCT) dengan anggaran sebesar Rp.39.000.000.000 dan realisasi sebesar Rp.37.427.613.664 (95,97%). Dengan target kinerja jumlah paket pengadaan pembangunan gedung Diagnostik dan Perawatan Penyakit Jantung, Paru dan Syaraf 5 lantai sejumlah 3 paket pekerjaan berupa Konstruksi fisik, Perencanaan dan Manajemen Konstruksi (MK) dan realisasi sebesar 3 paket pekerjaan atau capaian 100%.
- 5.6.Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000 dan realisasi sebesar Rp.99.461.000 (99,46%). Dengan target kinerja jumlah paket pengadaan perlengkapan sejumlah 3 paket berupa pemeliharaan gedung dan bangunan ; pembuatan Kanopi dan Ralling RAMP, Perencanaan dan Pengawasan pembuatan kanopi dan Ralling RAMP realisasi sebesar 3 paket pekerjaan atau capaian 100%.
6. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
- 6.1 Kegiatan : Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4 dengan anggaran sebesar Rp.212.617.742.654 dan realisasi sebesar Rp.177.798.033.788 (83,62%). Dengan target kinerja tersedianya pelayanan sesuai standar pelayanan minimal sebesar 95% dan realisasi standar pelayanan minimal (SPM) sebesar 74,42% atau capaian 78,33%.

II.1.1. Faktor – faktor tidak tercapainya target

Faktor – faktor tidak tercapainya target adalah :

2.1. Tenaga

Jumlah tenaga ada yang belum memenuhi standart kebutuhan.

2.2. Sarana Prasarana

Kebijakan penataan ulang IT RS yang rencana dilaksanakan pada tahun 2015 ditunda sehingga beberapa belanja pemeliharaan IT tidak bisa dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Selain itu untuk penyerapan anggaran operasional (sumber dana fungsional) tidak bisa maksimal karena adanya penurunan jumlah pasien yang disebabkan kebijakan BPJS terkait rujukan berjenjang.

2.3. Pembinaan Alur

Dengan adanya pembangunan fisik gedung / rehabilitasi bangunan, perlu dilakukan penataan ulang ruang perawatan dan alur pasien.

II.1.2. Implikasi yang timbul terhadap capaian Renstra

Program tahun 2015 dengan Renstra tahun 2014 – 2019 masih ada yang belum konsisten / sesuai. Beberapa program tahun 2015 belum ada konsistensi dengan Renstra dikarenakan masa transisi Renstra sebelumnya sehingga terjadi kesulitan untuk melihat capaian Renstra pada tahun tersebut.

II.1.3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

Dari hasil evaluasi terhadap pencapaian target dan dikaitkan dengan renstra, perlu ada kebijakan / tindakan untuk pencapaian target yaitu :

- a. Penataan ulang target untuk program dan kegiatan
- b. Penghitungan kembali target pendapatan
- c. Penataan penentuan indikator, masukan, keluaran dan hasil
- d. Penyusunan program dan kegiatan pada renstra.

Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD RSUD dr. Soedono Madiun s/d Tahun 2016 tertera di bawah ini :

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2016
PROVINSI JAWA TIMUR

Nama SKPD : RSUD Dr. SOEDONO MADIUN

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun <u>2014 - 2019</u>	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun <u>2015</u>	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun <u>2015</u>			Target program dan kegiatan (Renja SKPD <u>tahun 2016</u>)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (<u>tahun 2016</u>)			
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
					Tahun 2015	Tahun 2015			Tahun <u>2016</u>	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
1		Urusan Pemerintahan										
102	0400	Bidang Urusan Kesehatan										
102	0400	01	Program Administrasi perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat / aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	13.242.709.283 100%	1.777.919.750	2.288.902.850	1.777.919.750	79,50%	1.926.981.456	3.704.901.206	27,98%
		019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Prosentase anggaran terserap untuk mendukung kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	13.242.709.283	1.777.919.750	2.288.902.850	1.777.919.750	79,50%	1.926.981.456	3.704.901.206	
102	0400	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	947.740.505 100%	6.773.220.956	8.628.735.076	6.773.220.956	78,5%	7.198.627.890	13.971.848.846	234%
		012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah paket untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana	671.844.965	4.497.493.816	5.853.744.192	4.497.493.816	76,83%	5.496.474.890	9.993.968.706	

			031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah paket untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana	275.895.540	2.275.727.140	2.774.990.884	2.275.727.140	82,01%	1.702.153.000	3.977.880.140	
102	0400	07		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	6.594.859.755 100%	1.878.553.443	2.188.184.984	1.878.553.443	85,85%	2.570.435.000	4.448.988.443	67,46%
			001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase kegiatan koordinasi dan konsultasi kelembagaan		1.069.907.877	1.180.499.984	1.069.907.877	90,63%	1.401.005.000		
			002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan / pelatihan formal untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		808.645.566	1.007.685.000	808.645.566	80,25%	1.169.430.000		
102	0400	08		Program Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintah	750.000.000 100%	125.363.550	160.165.000	125.363.550	78,27%	183.685.000	309.048.550	41,21
			001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun		43.328.750	57.945.000	43.328.750	74,78%	75.000.000		
			002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun		45.914.800	65.740.000	45.914.800	69,84%	70.225.000		

			003	Penyusunan , Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah kegiatan update data SKPD		36.120.000	36.480.000	36.120.000	99,01%	38.460.000		
102	0400	47		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Prosentase pemenuhan pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana sesuai standart	126.750.000.000 92%	41.738.946.086	43.550.000.000	41.738.946.086	95,84%	136.905.500.000	178.644.446.086	140,9%
			006	Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)	Jumlah paket pengadaan alat kedokteran		1.104.186.250	1.200.000.000	1.104.186.250	92,02%	6.800.0000.000		
			007	Pendampingan Pelayanan Kesehatan (DAK)			108.936.672	120.000.000	108.936.672	90,78%	0		
102	0400	47	010	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur,Ruang pasien, Laundry, ruang tunggu,dll) RS/RSK/Balai / Akper/Latkesmas			97.955.000	100.000.000	97.955.000	97,96%	0		
			011	Pengadaan Alat Kesehatan / Lab RS/ RSK / Balai / Akper / Latkesmas			2.900.793.500	3.030.000.000	2.900.793.500	95,74%	0		

			013	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan bagi Penderita akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT)			37.427.613.664	39.000.000.000	37.427.613.664	95,97%	55.105.500.000		
			014	Pembangunan Sarana dan Prasarana RS/RSK/Balai/Akper /Latkesmas	Jumlah paket pembangunan sarana dan prasarana RS		99.461.000	100.000.000	99.461.000	99,46%	75.000.000.000		
102	0400	48		Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Prosentase pelayanan yang memenuhi standart	745.199.000.000	177.798.033.788	212.617.742.654	177.798.033.788	83,62%	184.560.719.000	362.358.752.788	48,62%
			001	Peningkatan Pelayanan RS / RS Khusus / BP4	Prosentase penyerapan anggaran untuk memenuhi standart pelayanan minimal		177.798.033.788	212.617.742.654	177.798.033.788	83,62%	184.560.719.000		

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD dr. Soedono Madiun

- Untuk pelayanan rawat inap tahun 2015 tempat tidur sebanyak 343 buah dengan tingkat pemanfaatan BOR 58,67%, ALOS 5 hari, BTO 53 kali/tahun dan TOI 3 hari. Untuk BOR, ALOS dan BTO masih belum sesuai dengan standart Depkes RI. Untuk BTO (bed turn over / pemakaian tempat tidur rs) melebihi ambang batas ideal artinya pemakaian tempat tidur rs sangat sering sehingga memungkinkan timbulnya infeksi nosokomial. Sehingga perlu dilakukan penataan ulang tempat tidur rumah sakit agar lebih efektif dan efisien.
- Untuk nilai GDR dan NDR yang masih tinggi dikarenakan pasien yang datang ke RSUD dr. Soedono Madiun rata – rata merupakan pasien rujukan dari unit layanan kesehatan wilayah sekitar RSUD dr. Soedono Madiun dan sudah dalam kondisi parah/sangat jelek. Sedangkan pihak keluarga pasien menolak untuk dirujuk ke rumah sakit yang lebih atas.
- Untuk indeks kepuasan masyarakat (IKM) tentang kinerja pelayanan di RSUD dr. Soedono Madiun didapat nilai sebesar 80,33 dalam kategori “B” dengan kinerja unit pelayanan “baik”.
- Cost recovery rate (CRR) menunjukkan kemampuan rumah sakit dalam mengelola keuangan sesuai kebutuhan operasional dalam satu tahun anggaran (tahun 2015 CRR sebesar 84,99%). Perkembangan cost recovery berjalan fluktuatif. Hal ini disebabkan faktor pendapatan dari pelayanan RS.
- Untuk tingkat kemandirian keuangan rumah sakit, belum bisa memenuhi target yang telah ditetapkan karena sesuai dengan pengelolaan keuangan BLUD saat ini untuk gaji pegawai masih disubsidi dan untuk belanja investasi khususnya alat – alat kedokteran juga masih disubsidi baik dari pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat.

Adapun tabel pencapaian kinerja pelayanan sebagai berikut.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN RSUD dr. SOEDONO MADIUN

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	BOR (bed occupacy rate)	60% - 85%	74	66	58	60	63	57,88	58,67	60	63	
2	ALOS (average lenght of stay)	6 - 9 hari	5	3	5	6	6	3	5	6	6	
3	BTO (bed turn over)	40 - 50 kali	52	78	40	65	50	72	57	65	50	
4	TOI (Turn over interval)	1 - 3 hari	2	2	2	2	2	2	3	2	2	
5	GDR (gross death rate)	< 45 %	59	76	70	60	45	76,24	108,50	60	45	
6	NDR (nett death rate)	< 25%	29	38	35	33	25	38,83	52,87	33	25	
7	CRR (cost recovery rate)		80	84	85	86	87	84,38	84,99	86	87	
8	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	81,26 - 100	84,05	80,7	80,7	80,8	76	80,7	80,33	80,8	76	
9	Prosentase indikator standart pelayanan minimal (SPM) yang mencapai target	%		63	80	82	76	63	74,42	82	76	
10	Persentase elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standart akreditasi versi 2012	%		22	80	80	80	22	>80	-	80	

11	Persentase elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standart akreditasi RS versi JCI	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Persentase peserta didik yang menyelesaikan periode tepat waktu di RS	100%		82	83	83	80	82	76	83	80	

II.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

a. Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan untuk ALOS maupun TOI di RSUD dr. Soedono Madiun tahun 2015 masih dalam batas ideal. Sedangkan BOR masih sedikit dibawah batas ideal, hal ini dikarenakan adanya kegiatan pembangunan gedung pelayanan di lingkungan RSUD dr. Soedono Madiun serta adanya regulasi BPJS yang mengharuskan rujukan berjenjang untuk pasien BPJS dengan mengoptimalkan layanan fasilitas kesehatan di kabupaten / kota / RS type C.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi RSUD dr. Soedono Madiun

- Kebutuhan tenaga medis yang masih kurang, terutama tenaga medis spesialis untuk pelayanan anak, bedah urologi dan spesialis jantung
- Kebutuhan tenaga medis sub spesialis yang masih kurang, sehingga untuk pelayanan sub spesialis pasien harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap
- Keterbatasan sarana prasarana untuk menunjang pelayanan khususnya peralatan kedokteran canggih

c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah :

- Dalam menjalankan pelayanan RSUD dr. Soedono Madiun memberikan pelayanan sesuai dengan Standart Pelayanan Minimal dan selalu berusaha untuk memenuhi kriteria dari SPM tersebut. Selain itu juga mendukung kegiatan MDG's dengan dukungan dari anggaran APBD Provinsi Jawa Timur dalam hal pelayanan terhadap pasien HIV/AIDS, pasien ketergantungan obat, dan pelayanan kepada ibu dan bayi beresiko. Bentuk dukungan tersebut adalah bantuan penyuluhan dengan pembuatan leaflet, transportasi untuk pengambilan reagen, obat-obatan antiviral dan kegiatan unggulan lainnya adalah program home visite untuk pasien beresiko.

d. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

- Sejak tahun 2015 MEA atau perdagangan bebas zona Asia, sudah mulai terlihat dengan berbenahnya RS swasta serta munculnya RS baru sekelas RS Siloam yang akan berdiri di Kota Madiun, sehingga RS dituntut untuk berbenah dengan memberikan pelayanan yang lebih profesional dan ketersediaan alat yang mendukung kelancaran pelayanan
- Adanya regulasi Jaminan Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan dengan sistem berjenjang dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan faskes pratama, akan

membawa dampak berkurangnya jumlah pasien yang dirawat. Hal ini menjadi peluang bagi RSUD dr. Soedono untuk melakukan inovasi pelayanan / pengembangan pelayanan yang disesuaikan dengan standart RS Klas B Pendidikan dan sesuai regulasi BPJS.

e. Formulasi isu – isu penting

Rekomendasi dan catatan strategis untuk menindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah :

1. Pembangunan Gedung Rawat Inap dan Diagnostik

Pembangunan gedung setinggi 5 lantai yang diperuntukkan layanan diagnostik dan layanan rawat inap, meliputi :

- ✓ Lantai 1 untuk pelayanan diagnostik / radiologi dengan pengembangan layanan MRI guna menunjang peningkatan pengembangan layanan rumah sakit rujukan wilayah barat – selatan Provinsi Jawa Timur
- ✓ Lantai 2 – 5 untuk ruang perawatan pasien stroke, NICU/PICU, pasien paru dan pasien jantung

Gedung 5 lantai tersebut juga dilengkapi dengan peralatan kedokteran yang mengikuti teknologi terbaru. Diharapkan dengan beroperasionalnya gedung tersebut, pasien yang dirujuk ke Provinsi Jawa Tengah dapat dilayani, kecuali untuk kasus – kasus khusus yang memerlukan pelayanan cangguh / sub spesialis.

2. Pelayanan Haemodialisa

Unit Hemodialisa RSUD dr. Soedono Madiun sudah beroperasi sejak tahun 2007 dengan modal awal sebanyak 4 unit mesin hemodialisa. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya pasien dengan kasus nefrologi / gagal ginjal, pihak rumah sakit berusaha untuk menambah jumlah mesin hemodialisa menjadi 8 unit. Melalui kerjasama dengan pihak ketiga telah dilakukan penambahan lagi menjadi 14 unit dan sampai saat ini sudah tersedia 17 unit mesin hemodialisa. Permintaan pelayanan Haemodialisa setiap tahun mengalami peningkatan. Hasil analisis kebutuhan alat yang diperlukan sebanyak 23, namun karena keterbatasan tenaga perawat ahli untuk haemodialisa maka yang beroperasi hanya 17 unit. Tahun 2015 sudah dilakukan pengembangan ruang haemodialisa sehingga pasien gagal ginjal sudah bisa dilayani dengan maksimal.

3. Pengembangan Trauma dan Critical Center

Tahun 2016 ada proses penyusunan karya perencana untuk pembangunan gedung 10 lantai yang akan dipergunakan untuk Layanan Trauma dan Critical Center, terdiri :

- ✓ Semi Basement : Parkir
- ✓ Lantai 1 : Triase UGD
- ✓ Lantai 2 : VK UGD, Cath Lab
- ✓ Lantai 3 : ICCU dan ICU
- ✓ Lantai 4 : High Care Non Surgical, High Care Ponak
- ✓ Lantai 5 : High Care Surgical
- ✓ Lantai 6 : Recovery Room Publik & Private
- ✓ Lantai 7 : Operating Theatre
- ✓ Lantai 8 : Operating Theatre
- ✓ Lantai 9 : Skill and Science Lab

4. Pengembangan Layanan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas Utama

Layanan rawat jalan dan rawat inap kelas utama diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan khusus dan fasilitas khusus pada pelayanan spesialistik.

5. Pengadaan lahan / pembelian tanah pada tahun 2016, yang akan dipergunakan untuk pengembangan, meliputi : pengembangan rawat inap kelas utama, penambahan lahan parkir karyawan, asrama PPDS, serta untuk pelayanan penunjang dan Diklit / RS Pendidikan

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

- a. Program dan Kegiatan di tahun 2017 terdiri dari 3 program rutin, 2 program pembangunan dan 1 program dengan pendanaan fungsional
- b. Program rutin terdiri dari program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana & prasarana, serta program penyusunan pengendalian & evaluasi dokumen
- c. Program pembangunan terdiri dari program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, dan program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan badan layanan umum daerah (BLUD)
- d. Program yang dibiayai oleh anggaran fungsional yaitu program peningkatan pelayanan badan layanan umum daerah (BLUD)

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016

PROPINSI JAWA TIMUR

Nama SKPD : RSUD dr. SOEDONO MADIUN

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Program pelayanan Administrasi perkantoran	Kota Madiun	Indeks kepuasan masyarakat / aparatur terhadap pelayanan	80%	5.497.297.890	Program pelayanan Administrasi perkantoran	Kota Madiun	Indeks kepuasan masyarakat / aparatur terhadap pelayanan	90%	2.367.240.000	
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kota Madiun	Prosentase anggaran terserap untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran	80%	5.497.297.890	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kota Madiun	Prosentase anggaran terserap untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran	90%	2.367.240.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Madiun	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	95%	5.575.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Madiun	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	7.198.627.890	
	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Kota Madiun	Jumlah paket untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana	12 bulan	4.800.000.000	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Kota Madiun	Jumlah paket untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana	95%	5.496.474.890	
	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Kota Madiun	Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana		775.000.000	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Kota Madiun	Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	100%	1.702.153.000	

3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi		1.832.690.000	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%	2.570.435.000	
	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Kota Madiun	Prosentase kegiatan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	12 bulan	1.250.000.000	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Kota Madiun	Prosentase kegiatan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	100%	1.401.005.000	
	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kota Madiun	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan / pelatihan formal untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	12 bulan	582.690.000	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kota Madiun	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan / pelatihan formal untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	1.169.430.000	
4	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Madiun	Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintah		65.000.000	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Madiun	Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintah	95%	183.685.000	
	Penyusunan dokumen perencanaan	Kota Madiun	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	12 bulan	25.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan	Kota Madiun	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 dokumen	75.000.000	
	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Kota Madiun	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	12 bulan	25.000.000	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Kota Madiun	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	5 dokumen	70.225.000	
	Penyusunan Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Kota Madiun	Jumlah kegiatan update data SKPD	12 bulan	15.000.000	Penyusunan Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Kota Madiun	Jumlah kegiatan update data SKPD	100%	38.460.000	
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Kota Madiun	Prosentase pemenuhan pengadaan peningkatan sarana prasarana sesuai standart		157.455.500.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Kota Madiun	Prosentase pemenuhan pengadaan peningkatan sarana prasarana sesuai standart	95%	136.905.500.000	

	Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)	Kota Madiun	Jumlah paket pengadaan alat kedokteran	12 bulan	0	Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)	Kota Madiun	Jumlah paket pengadaan alat kedokteran	3 paket	6.800.000.000	
	Pendampingan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)	Kota Madiun		12 bulan	0	Pendampingan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)	Kota Madiun			0	
	Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS (Dapur, ruang pasien,dll) RS/RSK/Balai / Akper / Latkesmas	Kota Madiun		12 bulan	15.250.000.000	Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS (Dapur, ruang pasien,dll) RS/RSK/Balai / Akper / Latkesmas	Kota Madiun			0	
	Pengadaan alat kesehatan lab / RS / RSK	Kota Madiun		12 bulan	75.000.000.000	Pengadaan alat kesehatan lab / RS / RSK	Kota Madiun			0	
	Peningkatan derajat kesehatan dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (DBHCHT)	Kota Madiun	Jumlah paket pengadaan alat kedokteran dan bangunan		55.105.500.000	Peningkatan derajat kesehatan dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (DBHCHT)	Kota Madiun	Jumlah paket pengadaan alat kedokteran dan bangunan	9 paket	55.105.500.000	
	Pembangunan sarana dan prasarana RS/RSK/Balai/Akper / Latkesmas	Kota Madiun	Jumlah paket pembangunan sarana dan prasarana RS		12.100.000.000	Pembangunan sarana dan prasarana RS/RSK/Balai/Akper / Latkesmas	Kota Madiun	Jumlah paket pembangunan sarana dan prasarana RS	12 paket	75.000.000.000	
6	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Kota Madiun	Prosentase pelayanan yang memenuhi standart pelayanan minimal		176.060.719.000	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Kota Madiun	Prosentase pelayanan yang memenuhi standart pelayanan minimal	95%	184.560.719.000	
	Peningkatan Pelayanan RS / RS Khusus / BP4	Kota Madiun	Prosentase penyerapan anggaran untuk memenuhi standart pelayanan minimal		176.060.719.000	Peningkatan Pelayanan RS / RS Khusus / BP4	Kota Madiun	Prosentase penyerapan anggaran untuk memenuhi standart pelayanan minimal	95%	184.560.719.000	

II. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam perencanaan program adalah adanya masukan pada kritik dan saran diberikan oleh masyarakat melalui kotak saran. Selain itu RSUD dr. Soedono Madiun juga melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 2 kali dalam satu tahun. Survey tersebut kami analisis dan menjadi masukan dalam pengembangan program di RSUD dr. Soedono Madiun. Demikian pula unit – unit kerja instalasi melakukan survey yang dilaksanakan 3 bulan sekali. Untuk melakukan koreksi atas pelayanan agar lebih baik.

Selain indeks kepuasan masyarakat, juga dilakukan survey kepuasan masyarakat berdasarkan standart pelayanan minimal yang diadakan 1 tahun 2 kali.

Keberadaan RS juga tidak lepas dari peran masyarakat yang percaya dalam mencari pelayanan kesehatan dan memutuskan untuk berobat ke RS. Dengan kepercayaan masyarakat tersebut, maka kami berusaha melakukan yang terbaik untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat melalui home visite dan promosi kesehatan (pelayanan kesehatan gratis) ditempat – tempat yang jauh dari pelayanan kesehatan.

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2017
PROVINSI JAWA TIMUR**

NAMA SKPD : RSUD dr. SOEDONO MADIUN

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Program pelayanan Administrasi perkantoran	Kota Madiun	Indeks Kepuasan Masyarakat /Aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	90%	
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kota Madiun	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa	50 paket	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Madiun	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	
	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Kota Madiun	Tersedianya penyediaan sarana dan prasarana rs untuk air,listrik dan terapi	12 bulan	
	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Kota Madiun	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin	147 unit	
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Kota Madiun	Prosentase Kelembagaan yang tepat fungsi	100%	
	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Kota Madiun	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	12 bulan	
	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kota Madiun	Jumlah kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; jumlah pegawai yang menjadi peserta dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	18 kegiatan; 200 orang	
	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Madiun	Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang tersusun tepat waktu	100%	
	Penyusunan dokumen perencanaan	Kota Madiun	Jumlah dokumen perencanaan yg tersusun	6 dokumen	

	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Kota Madiun	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran	5 dokumen	
	Penyusunan Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Kota Madiun	Jumlah evaluasi berkala update data base SKPD	4 kali	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Kota Madiun	Prosentase pemenuhan pengadaan ; peningkatan sarana prasarana sesuai standart	95%	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)	Kota Madiun	Jumlah paket pengadaan alat kedokteran	2 paket	
	Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS (Dapur, ruang pasien,dll) RS/RSK/Balai / Akper / Latkesmas	Kota Madiun			Tidak ada
	Pengadaan alat kesehatan lab / RS / RSK	Kota Madiun			Tidak ada
	Peningkatan derajat kesehatan dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (DBHCHT)	Kota Madiun			Tidak ada
	Pembangunan sarana dan prasarana RS/RSK/Balai/Akper / Latkesmas	Kota Madiun	Jumlah tersedianya gedung Trauma Center dan Intesif care	1 unit	
	Penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanankesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	Kota Madiun	Jumlah paket pengadaan alat kedokteran	1 paket	
	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Kota Madiun	Prosentase pelayanan yang memenuhi standart pelayanan minimal	95%	
	Peningkatan Pelayanan RS / RS Khusus / BP4	Kota Madiun	Jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap yang dilayani; Jumlah pengadaan alat – alat kedokteran	160.000 0rang; 16.000 orang	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang terbaik di lingkungan RSUD dr. Soedono Madiun bagi seluruh lapisan masyarakat, kemudahan akses dalam mendapatkan layanan yang berkualitas diarahkan pada kemudahan administrasi, terjangkau dan dapat memberikan kepuasan kepada seluruh lapisan masyarakat, serta dalam upaya pencapaian Standart Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

Kebijakan :

1. Layanan berorientasi pada subject, bukan pada administrasi dalam proses penyembuhan
2. Perubahan lebih baik yang berkelanjutan (continuous improvement) selalu menjadi bagian budaya kerja
3. Meningkatkan pendapatan fungsional dalam mendukung upaya kemandirian pembiayaan

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

III.2.1. Tujuan :

- a. Meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan rujukan bagi seluruh masyarakat

III.2.2. Sasaran Strategis Renja SKPD :

- a. Meningkatnya mutu dan aksesibilitas pelayanan medis dan penunjang medis
- b. Meningkatnya mutu pelayanan manajemen rumah sakit
- c. Meningkatnya mutu rumah sakit pendidikan

Sasaran peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan adalah makin terbukanya & makin mudah bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas tanpa diskriminasi, serta makin meningkatnya taraf kesehatan masyarakat yang tercermin dari :

- ❖ Menurunnya tren kematian bayi
- ❖ Penanggulangan gizi buruk yang baik dengan pemanfaatan buku KIA (Kesehatan Ibu & Anak)
- ❖ Meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit terutama pada penyakit tertentu (degeneratif dan metabolic)
- ❖ Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia sesuai kompetensi guna mendukung terwujudnya RS Pendidikan
- ❖ Meningkatkan sarana dan prasarana di rumah sakit
- ❖ Mendukung program MDG's terutama pada :
 - Goal 3 : Pengarusutamaan Gender

- Goal 4 : Penurunan angka kematian anak
- Goal 5 : Penurunan angka kematian ibu
- Goal 6 : Penurunan penyebaran HIV AIDS dan penyakit menular (TB dan Malaria)

III.3. Program dan Kegiatan

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan :
 - ❖ Pelaksanaan administrasi perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan :
 - ❖ Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana
 - ❖ Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana
- c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, dengan Kegiatan :
 - ❖ Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah
 - ❖ Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- d. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan :
 - ❖ Penyusunan dokumen perencanaan
 - ❖ Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran
 - ❖ Penyusunan, pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan sistem informasi data
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan :
 - ❖ Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)
 - ❖ Pembangunan sarana dan prasarana RS/RS Khusus/Balai/Akper/latkesmas)
- f. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan Kegiatan :
 - ❖ Penguatan pelayanan RS / RS Khusus

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

dan Prakiraan Maju Tahun 2017 – Perubahan

Provinsi/Kabupaten/Kota : Provinsi Jawa Timur

NAMA SKPD : RSUD dr. SOEDONO MADIUN

Lembar Dari

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 - Perubahan	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	02			Kesehatan						Kesehatan		
1	02	01		Program pelayanan Administrasi perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat / aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	Kota Madiun	100%	1.504.417.000	APBD	Program pelayanan Administrasi perkantoran	95%	1.504.417.000
1	02	01	019	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa	Kota Madiun	50 paket	1.504.417.000	APBD	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	50 paket	1.504.417.000
1	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	Kota Madiun	100%	5.261.533.000	APBD	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	5.261.533.000

1	02	02	012	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Tersedianya penyediaan sarana dan prasarana rs untuk air, listrik dan terapi	Kota Madiun	12 bulan	4.849.068.000	APBD	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 bulan	4.849.068.000
1	02	02	031	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin	Kota Madiun	147 unit	412.465.000	APBD	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	147 unit	412.465.000
1	02	07		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	Kota Madiun	100%	2.773.120.000	APBD	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%	2.773.120.000
1	02	07	001	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Kota Madiun	12 bulan	921.745.000	APBD	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	12 bulan	921.745.000
1	02	07	002	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; jumlah pegawai yang menjadi peserta dalam peningkatan sumber daya aparatur	Kota Madiun	18 jenis; 200 org	1.851.375.000	APBD	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	18 jenis; 200 orang	1.851.375.000
1	02	08		Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	Kota Madiun	100%	206.245.000	APBD	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	206.245.000
1	02	08	001	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Kota Madiun	6 dokumen	92.625.000	APBD	Penyusunan dokumen perencanaan	6 dokumen	92.625.000
1	02	08	002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran	Kota Madiun	5 dokumen	60.960.000	APBD	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	5 buku	60.960.000

1	02	08	003	Penyusunan Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah evaluasi berkala up date data base SKPD	Kota Madiun	4 kali	52.660.000	APBD	Penyusunan Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	4 kali	52.660.000
1	02	47		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Prosentase pemenuhan pengadaan peningkatan sarana prasarana sesuai standart	Kota Madiun	100%	73.399.084.000	APBD	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	95%	103.369.216.743
1	02	47	006	Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)	Jumlah paket pengadaan alat kedokteran	Kota Madiun	2 paket	13.399.084.000	APBD / DAK	Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)	2 paket	14.734.343.810
1	02	47	015	Penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	Jumlah paket pengadaan alat kedokteran dan pembangunan gedung	Kota Madiun	0 paket	0	APBD / CUKAI	Peningkatan derajat kesehatan dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (DBHCHT)	1 paket	905.725.165
1	02	47	014	Pembangunan sarana dan prasarana RS/RSK/Balai/Akper / Latkesmas	Jumlah tersedianya gedung trauma center dan intensif care	Kota Madiun	1 unit	60.000.000.000	APBD / PAJAK ROKOK	Pembangunan sarana dan prasarana RS/RSK/Balai/Akper / Latkesmas	1 unit	80.945.386.521
1	02	48		Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Prosentase pelayanan yang memenuhi standart pelayanan minimal	Kota Madiun	96%	195.003.842.000	APBD	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	95%	215.490.916.122
1	02	48	001	Peningkatan Pelayanan RS / RS Khusus / BP4	Jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap yang dilayani; jumlah pengadaan alat kedokteran	Kota Madiun	160.000; 16.000 orang	195.003.842.000	APBD	Penguatan pelayanan RS / RS Khusus	160.000; 16.000 orang	215.490.916.122

BAB IV PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Tahun 2017 RSUD dr. Soedono Madiun ini kami susun. RSUD dr. Soedono Madiun berusaha untuk terus meningkatkan profesionalitas dan performance melalui peningkatan kualitas SDM dan penambahan sarana prasarana. Selain itu peningkatan pengembangan dalam bidang IT berupa SIM-RS untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal

Guna mewujudkan program tersebut, kami anggarkan untuk belanja langsung dalam APBD Perubahan tahun 2017 sebesar Rp. 321.821.686.618,-. Alokasi tersebut dipergunakan untuk program pelayanan administrasi perkantoran Rp. 1.504.417.000,-; program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp. 5.261.533.000,-; program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah sebesar Rp. 2.773.120.000,-; program penyusunan pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintah Rp. 206.245.000,-; program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp. 103.369.216.743,- dan program peningkatan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp. 215.490.916.122,-

Sumber anggaran untuk operasional kegiatan tahun 2017 berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur dan anggaran fungsional. Untuk anggaran subsidi diharapkan tambahan alokasi anggaran dari dana alokasi khusus (DAK) dan pajak rokok.

Bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat sangat kami harapkan guna terpenuhinya kelancaran pelayanan kesehatan agar visi Pemerintah Jawa Timur “Makmur bersama wong cilik, melalui APBD Untuk Rakyat” dapat terlaksana.

Atas perhatian dan kebijaksanaan yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Madiun,

DIREKTUR RSUD dr. SOEDONO MADIUN



dr. BANGUN TRAPSILA PURWAKA, Sp. OG(K), M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19601021 198511 1 001

